

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada perencanaan strategis SI/TI di lingkungan pemerintahan desa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Analisis proses aktivitas telah dilakukan berdasarkan turunan dari aktivitas pada model *value chain* dan melakukan analisis kesenjangan dari proses aktivitas yang sedang berlangsung dan memberikan solusi perancangan kembali proses aktivitas untuk meningkatkan kinerja aktivitas, baik aktivitas utama maupun pendukung. Hasil analisis menjadi masukan bagi tahap pemodelan *business architecture* pada TOGAF ADM.
2. Model EA telah dibangun dengan menyusun arsitektur data dan aplikasi yang terintegrasi dengan proses aktivitas sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2015. Penyusunan dilakukan terdiri dari daftar kandidat aplikasi dibagi menjadi 2 jenis desa yaitu desa nelayan dan pertanian. Pada desa nelayan dapat dibangun sebanyak 47 aplikasi, begitu juga dengan desa pertanian dapat dibangun sebanyak 47 aplikasi. Aplikasi-aplikasi kemudian dipetakan menggunakan *Technology Reference Model (TRM)*.

Perancangan infrastruktur teknologi ditentukan dengan skema jaringan yang mengacu pada kondisi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dari hasil analisis, ditemukan sebanyak 5 bagian infrastruktur perlu dibangun, yaitu pembangunan jaringan menggunakan *internet broadband*, simpan data menggunakan *cloud*, penambahan menara penguat sinyal bagi daerah yang tidak terjangkau sinyal selular dan penambahan *bandwidth*.

3. *Roadmap* rencana pengembangan aplikasi telah disusun dan dapat menjadi acuan dan panduan dalam penerapan SI/TI yang sesuai dengan kewenangan lokal skala desa.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam rangka pengembangan penelitian ini adalah :

1. Rencana strategis SI/TI yang sudah disusun dapat dikembangkan lebih jauh dengan menambahkan jenis-jenis desa selain desa pertanian dan desa nelayan.
2. Penyusunan *information architecture* yang sudah dirancang dapat ditambahkan tahap arsitektur informasi yang bertujuan mengidentifikasi komponen informasi, di mana informasi dibutuhkan dan bagaimana informasi dibagi untuk misi dari fungsi aktivitas.
3. Rencana strategis SI/TI yang disusun untuk desa pertanian dan desa nelayan bisa lebih dispesifikasikan lebih jauh mengenai kedua jenis desa tersebut.

Daftar Pustaka

- Al About, F.N., 2011. Strategic Information Systems Planning : A Brief Review. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 11(5), pp.179-83.
- Alonso, I.A., Verdun, J.C. & Caro, E.T., 2010. The IT Implicated Within The Enterprise Architecture Model: Analysis of Architecture Models and Focus IT Architecture Domain. *2010 IEEE International Conference*.
- Ansoff, H.I., Declerk, R.P. & Hayes, R.L., 1976. *From Strategic Planning To Strategic Management*. New York: John Wiley & Sons.
- Buckl, S. et al., 2009. *State of the art in enterprise architecture management*. [Online] Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.212.3688>.
- Coronel, C., Morris, S. & Rob, P., 2011. *Database Systems Design, Implementation, and Management*. 11th ed. United States of America: Cengage Learning.
- Gandhi, A. & Kurniati, A.P., 2012. Perencanaan Strategis Sistem Informasi Berbasis TOGAF ADM Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, pp.7-14.
- Geambasu, C.V., 2012. BPMN VS. UML Activity Diagram for Business Process Modeling. *Accounting and Management Information Systems*, 11(4), pp.637-51.
- Glienmourinsie, D., 2015. *12.000 Lebih Desa di Indonesia Belum Dialiri Listrik*. [Online] Available at: <http://ekbis.sindonews.com/read/965099/33/12-000-lebih-desa-di-indonesia-belum-dialiri-listrik-1424079023> [Accessed 10 November 2015].
- Humas Provinsi Jateng, 2014. *Pengelola Aset Desa Ikuti Bintek Pengelolaan Aset Desa*. [Online] Available at: <http://jatengprov.go.id/id/newsroom/pengelola-aset-desa-ikuti-bintek-pengelolaan-aset-desa> [Accessed 19 Juni 2015].

- Indrajit, R.E., 2006. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jahja, R., Haryana, H., Mariana, D. & Rendra, M., 2012. *Sistem Informasi Desa : Sistem Informasi dan Data untuk Pembaruan Desa*. Yogyakarta: COMBINE Research Institute.
- Jogiyanto, 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian Desa PDTT;, 2014. *Daerah Tertinggal*. [Online] Available at: <http://kemendes.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-tertinggal> [Accessed 10 November 2015].
- Khairuddin, I., 2015. *480 BTS Telkomsel Kawal Wilayah Perbatasan NKRI*. [Online] Available at: <http://selular.id/news/2015/08/480-bts-telkomsel-kawal-wilayah-perbatasan-nkri/> [Accessed 10 November 2015].
- Laudon, K.C. & Laudon, J.P., 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007. *Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*. Peraturan Mendagri. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Menteri. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Peraturan Menteri. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. *Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha*

- Milik Desa*. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Minoli, D., 2008. *Enterprise Architecture A to Z: Frameworks, Business Process Modeling, SOA, and Infrastructure Technology*. Auerbach Publications.
- Mujiono, M., 2012. Perancangan Strategis Sistem Dan Teknologi Informasi Kementerian / Lembaga. In *Seminar Nasional Manajemen Teknologi*. Surabaya, 2012.
- Parizeau, Y., 2002. *Enterprise Architecture for Complex Government and the Challenge of Government On-Line in Canada*. Dalhousie University.
- Pemerintahan Daerah DIY, 2013. *Media Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta*. [Online] Available at: <https://kependudukanpemdadiy.wordpress.com/> [Accessed 5 September 2015].
- Porter, M., 1985. *Competitive Advantage*. New York: Free Press.
- Razak, R.A., Dahalin, Z.M., Ibrahim, H. & Yusop, N.I., 2011. Investigation on the importance of enterprise architecture in addressing business issues. In *Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS)*, 2011.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara RI Tahun 2014*.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Sasmito, G.W., 2013. Annual Performance Planning Information System with Enterprise Architecture Modelling the Secretariat of the Central Java Province Parliament Used Framework Togaf. *International Journal of Social Science and Humanity*, IV(3), pp.334-38.
- Satriawan, G., 2015. *Detik i-net*. [Online] Available at: <http://inet.detik.com/read/2015/10/13/155201/3043390/398/mengukur-bandwidth-di-desa-broadband> [Accessed 6 November 2015].

- Schekkerman, J., 2011. *Enterprise Architecture Tool Selection Guide*. Institute For Enterprise Architecture Developments.
- Sudjatmiko, B., 2014. *Isu-Isu Strategis Desa*. [Online] Jakarta, Indonesia Available at: <http://www.keuangandes.com/2015/01/isu-isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko/> [Accessed 18 Juni 2015].
- Sudjatmiko, B. & Zakaria, Y., 2015. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Tahriludin, U., 2012. *Perancangan enterprise arsitektur sistem informasi penjadwalan menggunakan kerangka kerja Togaf ADM : (studi kasus SMK Muhammadiyah 2 Kuningan)*. Thesis. Bandung: Universitas Komputer Bandung Universitas Komputer Bandung.
- Tambotih, J.J., 2010. *Penerapan Kajian Kelayakan Finansial untuk Meningkatkan Tingkat Kematangan Manajemen Investasi Sistem Informasi/Teknologi Informasi Studi Kasus: PT. PLN (Persero)*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ticoalu, V.E., 2015. *Perancangan Enterprise Architecture Menggunakan Togaf Adm Untuk Mencapai Universitas Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus: Unika De La Salle Manado)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tozer, E.E., 1996. *Strategic IS/IT Planning*. Massachusetts: Butterworth-Heinemann.
- Wardiana, W., 2002. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. In *Seminar dan Pameran Teknologi Informasi*. Bandung, 2002.
- Ward, J. & Peppard, J., 2003. *Strategic Planning for Information Systems*. 3rd ed. Sidney: John Wiley & Sons.
- Widiatmo, R.L., 2012. *Perencanaan Strategis Sistem Informasi/ Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (Studi Kasus : Pemda Kabupaten Sumba Barat)*. Tesis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Wisnubhadra, I. & Putro, Y.S.P.W., 2015. *Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan Terintegrasi Yang Selaras Dengan Tujuan Pembangunan Desa Dalam UU Nomor 6/2014*. Usulan Penelitian Institusi. Yogyakarta: Univeristas Atma Jaya Yogyakarta.

Yunis, R., Surendro, K. & Panjaitan, E.S., 2010. Pengembangan Model Arsitektur Enterprise untuk Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI)*, 8(1), pp.9-18.





Skrip Wawancara

Narasumber : Pak Yudi

Instansi : Kantor Desa Panggungharjo, Kab. Bantul, DIY

Jabatan : Kepala Desa

Pertanyaan penulis :

“Apa saja kewenangan dari pemerintahan desa ?”

Jawaban narasumber :

“Kewenangan desa, seperti yang sudah tercantum pada peraturan atau undang-undang, pelayanan publik, mengelola pembangunan, mengelola pembinaan kemasyarakatan, mengelola dana desa, musyawarah, aset, BUM Desa, dan lain-lain.”

Pertanyaan penulis :

“Dari sekian kewenangan desa, pada kewenangan pelayanan publik, bagaimana kondisi saat ini dalam pelaksanaan aktivitas ini di lingkungan pemerintahan desa Panggungharjo ?”

Jawaban narasumber :

“Pada pelayanan publik, atau bisa dikatakan penyelenggaraan pemerintahan, terkait pada tidak hanya mengenai administrasi publik, tetapi juga barang dan jasa publik. Maksudnya di sini adalah seperti penyewaan dan penggunaan gedung olahraga dan gedung pertemuan milik desa. Untuk bagian jasa publik di desa ini seperti pembersihan sampah. Jasa publik ini dilaksanakan dari badan yang berada di luar pemerintahan sendiri, seperti pada BUMDes. Terkait administrasi publik juga meliputi inventarisasi tanah kas desa. Kemudian pada pengelolaan dokumentasi sudah ada sistem arsip desa. Pada arsip ini, kami sudah melakukan backup setiap arsip dan dokumen dengan menyimpan dalam bentuk softcopy, kecuali akta tanah. Arsip-arsip ini tidak semua bisa diakses oleh warga, ini dikhususkan pada arsip negara yang bersifat rahasia, seperti nomor telepon warga tidak bisa dibuka sebarang. Selain itu, pembinaan kemasyarakatan desa dilakukan oleh pos pelayanan terpadu kami. Kondisi umumnya masih berjalan baik walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada kendala seperti keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Solusi dari keluhan-keluhan dan kendala itu bisa dilihat dalam RKP Desa yang berisi satu gambaran kerja untuk memperbaiki keluhan-keluhan dan kendala ini.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana jalannya pembangunan di desa ini ?”

Jawaban narasumber :

“Pembangunan desa menggunakan data dasar di profil desa. Informasi mengenai pembangunan tersampaikan dengan baik dan masyarakat tentu harus memiliki outliner yang terkait dengan kebijakan pembangunan desa.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana idealnya jalannya pembangunan di desa?”

Jawaban narasumber :

“Pembangunan desa memiliki Arah Kebijakan Pembangunan Desa. Di dalam dokumen ini terdapat beberapa skala prioritas dan pembangunan di bidang infrastruktur bisa dikatakan ada di prioritas teratas. Jadi dapat dikatakan idealnya pembangunan desa itu berdasarkan skala prioritas dan penggunaan dana desa sendiri. Umumnya, sering terjadi miskomunikasi antar instansi karena ada proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tetapi tidak memberitahukan terlebih dahulu sehingga proyek tersebut tidak tercantum di dalam RKP Desa.”

Pertanyaan penulis :

“Untuk pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan sendiri bagaimana pak ?”

Jawaban narasumber :

“Pada pemberdayaan, sasaran warga pada masyarakat yang rentan dan memiliki ketidakberdayaan secara sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu strateginya membuat forum desa. Untuk pembinaan, kita melakukan bantuan advokasi non-litigasi. Bantuan ini sangat penting, karena bantuan ini dapat menghindarkan konflik berkepanjangan di antara dua kubu masyarakat yang bertikai.”

Pertanyaan penulis :

“Idealnya untuk pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan sendiri bagaimana pak ?”

Jawaban narasumber :

“Analisis sasaran warga dilakukan secara berbasis komunitas. Analisis ini lebih efektif dalam mengumpulkan data berdasarkan kelompok-kelompok di dalam masyarakat dan tepat sasaran.”

Pertanyaan penulis :

“Apa saja tahapan-tahapan pada perencanaan ?”

Jawaban narasumber :

“Pertama dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Pedukuhan atau biasa disingkat Musrenbangduk. Kemudian kita juga menyelenggarakan RPD yang mengangkat isu-isu yang menjadi sorotan di masyarakat, di sini mengundang stakeholder-stakeholder di luar masyarakat. Hasil dari dua musyawarah ini dikompilasikan dalam bentuk RKPD. RKPD ini kemudian diangkat ke forum yang bernama Musrenbang Tingkat Desa.”

Pertanyaan penulis :

“Apa saja tahapan-tahapan pada pengelolaan aset ?”

Jawaban narasumber :

“Pertama yaitu dilakukan inventarisasi, dan ditentukan perbedaan menjadi 2 jenis, yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. Aset-aset kemudian disusun dan dilihat bagian mana yang bersifat potensial dan tidak potensial. Ada aset yang tidak potensial akan dialihfungsikan agar bermanfaat bagi masyarakat.”

Pertanyaan penulis :

“Terkait dengan keuangan desa atau dana desa, bagaimana penanganannya dan tahapannya ?”

Jawaban narasumber :

“Kami memiliki rekening desa yang berfungsi menampung dana kas desa. Untuk proses pencairan dana, ada prosedur yang disebut SPP atau Surat Permohonan Pencairan. SPP ini dilakukan berdasarkan APBDes. Bendahara kemudian melakukan pencairan anggaran dan

dicatat di dalam BKU(Buku Kas Umum) untuk kemudian pelaksanaan akan dibuat laporan.

Pertanyaan penulis :

“Terkait dengan pengelolaan BUMDes, bagaimana pengelolaannya ?”

Jawaban narasumber :

“Secara prinsip, BUMDes dibentuk untuk menjalankan sebagian fungsi dari pemerintahan sendiri. BUMDes mempunyai kewenangan berupa kewenangan yang terpisah dari pemerintahan desa, seperti pada kewenangan terhadap keuangan, sumber daya manusia, dan aset. Pelaporan BUMDes akan dimasukkan ke dalam APBDesa dan pemerintah desa bertanggung jawab terhadap BUM Des. ”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana jalannya pembangunan kawasan perdesaan saat ini ?”

Jawaban narasumber :

“Pembangunan kawasan perdesaan saat ini sudah berjalan dan ada inisiasi-inisiasi dari pemerintah kabupaten yang bertujuan meningkatkan kerja sama antar desa. Untuk meningkatkannya, biasanya dibentuk Badan Kerja Sama Antar Desa. Melalui Badan ini masyarakat desa dapat menyalurkan aspirasi dalam pembangunan kawasan perdesaan.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan di desa ini ?”

Jawaban narasumber :

“Pengelolaannya diberikan sepenuhnya kepada masyarakat dan kewenangannya dikelola oleh pemerintah kabupaten. Ada juga Lembaga Desa yang berfungsi mengelola sebagian kewenangan dari pemerintahan desa sendiri berdasarkan aspek distributif. Untuk pendanaan, pemerintah desa tidak diberitahukan mengenai alokasi dana oleh pemerintah kabupaten, jadi lembaga kemasyarakatan desa langsung berhubungan ke pemerintah kabupaten.”

Skrip Wawancara

Narasumber : Pak Eko

Instansi : Kantor Desa Sukoreno, Kab.Kulonprogo, DIY

Jabatan : Pengelola SIDEKA Desa Sukoreno

Pertanyaan Penulis :

“Apakah jenis desa Sukoreno ?”

Jawaban narasumber :

“Desa Budaya.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana implementasi dari sistem informasi desa yang saat ini berjalan ?”

Jawaban narasumber :

“Saat ini masih banyak menemui kendala, seperti pendampingan yang tidak teratur, data penduduk yang tidak terintegrasi, dan seringkali data tidak sinkron dengan keadaan saat ini.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana dengan kondisi permasalahan di desa sendiri ?”

Jawaban narasumber :

“Permasalahan yang ditemui di desa seputar data kependudukan yang sering tidak update dan tidak sinkron seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya. Untuk masalah umum berada di seputar pendidikan, kesehatan, dan penggolongan usia penduduk yang berkaitan juga dengan data. Akibatnya ini pemerintah desa tidak memiliki data kemiskinan yang kredibel, sedangkan data yang valid dimiliki oleh BPS. Peta rumah tangga miskin dan potensi desa juga tidak dimiliki dan masih bergantung pada bantuan Capil (Catatan Sipil). Untuk internal pemerintah, masih pada sumber daya manusia seperti penguasaan TIK yang belum memadai.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana dengan kondisi BUMDes dan Lembaga Kemasyarakatan ?”

Jawaban narasumber :

“BUMDes saat ini sudah berjalan sesuai dengan jalur dan perencanaannya. Biasanya memberi laporan setahun sekali. Begitu juga dengan Lembaga Kemasyarakatan. Untuk pendanaannya, lembaga kemasyarakatan ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten dan terkadang pemerintah desa tidak diberitahukan mengenai hal ini.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana dengan pengelolaan dokumentasi dan administrasi publik ?”

Jawaban narasumber :

“Untuk dokumentasi arsip dan surat menyurat masih bergantung pada hardcopy. Saat ini beberapa arsip belum dibackup menjadi softcopy. Untuk surat menyurat penggolongan masih dilakukan secara manual, seperti pada pengolongan surat masuk dan surat keluar. Pada tahap ini ditemui permasalahan seperti kesulitan mencari data surat-surat yang lama. Untuk administrasi publik berjalan normal, terkadang masih mendapat keluhan mengenai urusan yang berbelit-belit dan kesalahpahaman masyarakat.”

Pertanyaan penulis :

“Bagaimana dengan pemberdayaan masyarakat ?”

Jawaban narasumber :

“Untuk pemberdayaan masyarakat tidak menemui kendala yang berat, hanya saja ada beberapa kendala umum seperti masalah modal, pemasaran, dan pelatihan yang tidak berkesinambungan.”

Pertanyaan penulis :

“Dari beberapa permasalahan yang ditemui, apakah Sistem informasi memiliki peranan penting dalam menangani masalah-masalah ini ?”

Jawaban narasumber :

“Saya pikir iya, karena dengan sistem informasi, pemerintah bisa melakukan analisis data dengan cepat tanpa menunggu waktu yang lama.”